JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) VOL 6, No.2, Oktober 2026, pp. 50 - 60
p-ISSN : 2808-8786 [print]
e-ISSN : 2798-1355 [online]
http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika page 50
DOI : https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2

Fiscal Sustainability melalui Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan

Fasya Mazaya Ranindya[1], Bayu Wijayantini[2*], Achmad Hasan Hafidzi[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, Gumuk Kerang Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember,
e-mail: fasyamazaya2003@gmail.com, bayu@unmuhjember.ac.id, achmad.hasan@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 Juni 2026
Received in revised form 10 Juli 2026
Accepted 07 Agustus 2026
Available online 30 Oktober 2026

ABSTRACT

This paper analyzes the influence of Locally Generated Revenue (PAD), capital expenditure, and Intergovernmental Transfers (Balancing Funds) on fiscal sustainability in Situbondo Regency. A quantitative approach was employed using secondary data derived from the monthly Budget Realization Reports (LRA) of Situbondo Regency for the period 2021–2025. The study utilized a saturated sampling technique, with all monthly observations included in the analysis (n = 60). Fiscal sustainability was measured using the regional fiscal independence ratio, which reflects the ability of the local government to finance its expenditures through its own-source revenue. Data were analyzed using multiple linear regression.

The findings reveal that Locally Generated Revenue (PAD) has a positive and significant effect on fiscal sustainability, indicating that stronger revenue-generating capacity enhances regional fiscal independence and supports the sustainability of local public finances. Capital expenditure exhibits a negative but insignificant effect, suggesting that capital spending has not yet been optimally translated into improved fiscal capacity and long-term fiscal sustainability. In contrast, Intergovernmental Transfers (Balancing Funds) have a negative and significant effect on fiscal sustainability, implying that excessive reliance on central government transfers may weaken regional fiscal autonomy and increase fiscal vulnerability. These findings highlight the importance of strengthening local revenue sources and improving the effectiveness of public expenditure management to support sustainable fiscal development at the regional level.

Keywords: *Fiscal Independence; Fiscal Sustainability; Intergovernmental Transfers; Local Government Finance; Regional Revenue .*

.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan Kabupaten Situbondo periode 2021–2025. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode

Received 17 Juni, 2026; Revised 10 Juli, 2026; Accepted 07 Agustus, 2026

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

saturated sampling, sehingga seluruh data observasi selama periode penelitian digunakan sebagai sampel. *Fiscal Sustainability* diproksikan menggunakan rasio kemandirian fiskal yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fiscal Sustainability*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa realisasi investasi publik belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas fiskal dalam jangka pendek. Sementara itu, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Sustainability*, yang mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berpotensi melemahkan otonomi fiskal daerah dan meningkatkan kerentanan fiskal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sumber-sumber PAD serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja publik guna mewujudkan keberlanjutan fiskal daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

.

Kata Kunci Keberlanjutan Fiskal; Keuangan Pemerintah Daerah; Kemandirian Fiskal; Pendapatan Daerah; Transfer Antarpemerintah.

1. PENDAHULUAN

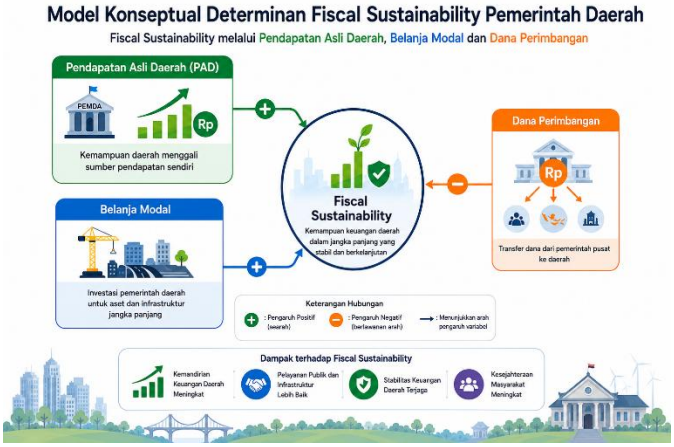
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya tercermin dari kemampuan pemerintah daerah merealisasikan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam jangka panjang [1].

Keberlanjutan fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara berkesinambungan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan pada masa mendatang. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberlanjutan fiskal berkaitan erat dengan tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan belanja, serta kemampuan daerah mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat cenderung lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan dan lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi maupun perubahan kebijakan nasional [2] [3].

Tiga komponen utama yang berperan dalam membentuk keberlanjutan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan transfer antarpemerintah atau dana perimbangan. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan menjadi indikator penting kemandirian fiskal. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Belanja modal berfungsi sebagai instrumen investasi publik yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dan aset produktif. Sementara itu, dana perimbangan berperan dalam mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, meskipun ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap transfer pusat berpotensi melemahkan insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal [4].

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini disajikan pada Gambar diatas. Model konseptual tersebut menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal diperkirakan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan fiskal daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber pendanaan secara mandiri, sehingga dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal. Sementara itu, belanja modal berperan sebagai investasi publik yang berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355



Gambar 1. Model Konseptual Determinan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Daerah

Sebaliknya, dana perimbangan diperkirakan memiliki hubungan negatif terhadap keberlanjutan fiskal apabila proporsinya terlalu dominan dalam struktur pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dapat mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dan menurunkan insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal [5]. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya fiskal yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola struktur pendapatan dan belanja secara seimbang dan berkelanjutan [6]. Permasalahan tersebut masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Situbondo. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer yang mendominasi struktur APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik belum tentu sejalan dengan tingkat keberlanjutan fiskal yang kuat. Tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat juga sering dikaitkan dengan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan dengan pendapatan yang dihimpun dari sumber-sumber daerah sendiri [7], [8].

Kajian mengenai pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kondisi fiskal daerah telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian terdahulu menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maupun kapasitas fiskal daerah [9], [10], [11], [12], [13]. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dapat memperkuat kemandirian fiskal. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pembangunan daerah [9], [10], [14] , meskipun terdapat penelitian yang menemukan bahwa efektivitas belanja modal belum selalu mampu meningkatkan kapasitas fiskal secara optimal. Hasil penelitian mengenai dana perimbangan juga belum menunjukkan kesimpulan yang seragam. Beberapa studi menemukan pengaruh positif terhadap kondisi fiskal daerah [9], [10], [11], [12], [13], sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat justru dapat menghambat kemandirian fiskal daerah [15], [16]. Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat research gap terkait hubungan antara PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan indikator kinerja keuangan daerah atau dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara agregat. Penelitian yang secara khusus menguji keberlanjutan fiskal menggunakan rasio kemandirian fiskal sebagai proksi, terutama pada daerah dengan karakteristik ketergantungan transfer yang tinggi seperti Kabupaten Situbondo, masih relatif terbatas.

Kontribusi Orisinal penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif keberlanjutan fiskal sebagai variabel dependen dengan mengintegrasikan PAD, belanja modal, dan transfer antarpemerintah dalam satu model empiris pada tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan periode 2021–2025 yang mencakup fase pemulihan pascapandemi COVID-19 dan implementasi berbagai kebijakan fiskal nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap dinamika kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan data tahunan. Berdasarkan landasan teori, temuan empiris terdahulu, dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Situbondo, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo.

H2: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo.

H3: Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja yang lebih berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal dan Fiscal Federalism

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Oates menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga lebih efektif dalam menyediakan layanan publik sesuai karakteristik wilayah masing-masing [17]. Dalam perspektif ini, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer fiskal dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas fiskal yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep desentralisasi fiskal menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja publik, dan transfer antarpemerintah sebagai instrumen utama untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah [15].

Keberlanjutan Fiskal (Fiscal Sustainability)

Keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) mengacu pada kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kondisi keuangan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan pada masa mendatang [18]. Dalam konteks pemerintah daerah, keberlanjutan fiskal mencerminkan kemampuan daerah membiayai pengeluarannya melalui sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan serta meminimalkan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Menurut OECD [19] dan IMF [20], keberlanjutan fiskal daerah ditentukan oleh keseimbangan antara kapasitas pendapatan, efektivitas pengeluaran, dan tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi guncangan ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal nasional [21].Dalam penelitian ini, keberlanjutan fiskal diproksikan menggunakan rasio kemandirian fiskal daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan fiskalnya melalui pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kewenangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan secara mandiri [22]. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap kapasitas fiskal dan kemandirian daerah [5], [16]. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri mampu memperkuat keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau meningkatkan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal mencakup belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Dalam perspektif pembangunan daerah, belanja modal dipandang sebagai investasi publik yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak daerah, dan pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah [23]. Beberapa penelitian menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah [24], [25] . Namun demikian, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Belanja modal yang tidak produktif dapat meningkatkan beban fiskal tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pendapatan daerah.

Transfer Antarpemerintah (Dana Perimbangan)

Transfer antarpemerintah atau dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta kesenjangan horizontal antardaerah [26]. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap transfer pusat dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri [16], [23]. Fenomena tersebut dikenal sebagai *flypaper effec*, yaitu kondisi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap pendapatan yang dihimpun sendiri. Dalam jangka panjang, ketergantungan yang

Arah Perkembangan Literatur

Kajian mengenai determinan kondisi fiskal pemerintah daerah terus berkembang seiring dengan implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah [15], [24]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara konsisten berkontribusi positif terhadap kapasitas fiskal dan kemandirian daerah, sedangkan pengaruh belanja modal dan dana perimbangan masih menunjukkan temuan yang beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian akademik mulai bergeser dari pengukuran kinerja keuangan konvensional menuju konsep keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan ketidakpastian ekonomi. Literatur terkini menekankan bahwa keberlanjutan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan belanja serta tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat [27], [28], [29] .

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap keberlanjutan fiskal daerah masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kabupaten dengan karakteristik ketergantungan transfer yang tinggi. Sebagian besar studi masih menggunakan indikator kinerja keuangan, efektivitas anggaran, atau efisiensi pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas literatur dengan menempatkan keberlanjutan fiskal sebagai fokus utama analisis serta mengintegrasikan ketiga variabel fiskal tersebut dalam satu model empiris.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (explanatory research), yang bertujuan menganalisis hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan terhadap keberlanjutan fiskal Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur pengaruh antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik berdasarkan data numerik yang tersedia [30].

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Situbondo yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Data yang dianalisis mencakup periode Januari 2021

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

sampai dengan Desember 2025 dalam bentuk data bulanan, sehingga diperoleh 60 observasi penelitian (n = 60). Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu penelitian mencakup fase pemulihan pascapandemi COVID-19 dan berbagai penyesuaian kebijakan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi kondisi keberlanjutan fiskal.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *saturated sampling* (sampling jenuh), yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian [31]. Dengan demikian, seluruh data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan Kabupaten Situbondo selama periode 2021–2025 digunakan sebagai unit analisis. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) yang diproksikan menggunakan rasio kemandirian fiskal daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Variabel independen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan. Definisi operasional masing-masing variabel disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Fiscal Sustainability (Y)	Rasio Kemandirian Fiskal = PAD / Pendapatan Transfer × 100%	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Realisasi PAD bulanan (Rp)	Rasio
Belanja Modal (X2)	Realisasi Belanja Modal bulanan (Rp)	Rasio
Dana Perimbangan (X3)	Realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer bulanan (Rp)	Rasio

Sumber : [32]

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo. Sebelum pengujian hipotesis, data terlebih dahulu dianalisis melalui statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) [27]. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dengan:

Y	:	Fiscal Sustainability (Keberlanjutan Fiskal)
A	:	Konstanta
β_1, β_2, β_3	:	Koefisien regresi
X_1	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X_2	:	Belanja Modal
X_3	:	Dana Perimbangan
ε	:	Error term

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap keberlanjutan fiskal serta uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi keberlanjutan fiskal Kabupaten Situbondo. Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0{,}05$).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Studi ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo periode 2020–2024 yang dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid.

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

Pada tahap awal, pengujian normalitas menunjukkan adanya beberapa observasi yang teridentifikasi sebagai outlier. Sesuai prosedur penelitian, observasi tersebut kemudian dievaluasi menggunakan metode boxplot dan dikeluarkan dari analisis karena berpotensi menyebabkan distorsi pada model regresi. Setelah proses tersebut dilakukan, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian menjadi 58. Hasil pengujian ulang menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 (>0,05). Selanjutnya, pengujian multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki *nilai tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, sehingga tidak ditemukan korelasi yang kuat antarvariabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas juga menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 pada seluruh variabel, yang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat homogen. Sementara itu, pengujian autokorelasi menggunakan Run Test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,185 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tersebar secara acak dan tidak mengandung autokorelasi.

Setelah seluruh asumsi terpenuhi, analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Fiscal Sustainability Kabupaten Situbondo. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. Ringkasan Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	299,566	4,133	0,000	-
PAD (X1)	0,148	5,563	0,000	H1 diterima
Belanja Modal (X2)	-0,002	-1,231	0,224	H2 ditolak
Dana Perimbangan (X3)	-0,209	-15,375	0,000	H3 diterima

Keterangan : Adjusted R^2 = 0,829 Jumlah Observasi = 58
Sumber : Olahan Data 2026

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 299{,}566 + 0{,}148X_1 - 0{,}002X_2 - 0{,}209X_3 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki arah hubungan positif terhadap *Fiscal Sustainability*, sedangkan Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki arah hubungan negatif. Dari ketiga variabel independen yang diuji, PAD dan Dana Perimbangan terbukti berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,829 mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Sebesar 82,9% variasi *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan oleh variasi PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan. Adapun sisanya sebesar 17,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, efektivitas pengelolaan belanja operasional, tingkat investasi daerah, kapasitas kelembagaan, maupun faktor kebijakan fiskal lainnya. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya fiskal yang dimiliki, tetapi juga oleh struktur pendapatan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan masing-masing variabel terhadap *Fiscal Sustainability* pada bagian pembahasan berikut.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Sustainability*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fiscal Sustainability Kabupaten Situbondo. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,148 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, peningkatan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskalnya. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori *Fiscal Federalism* yang menempatkan PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah [17], [19] . Daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lokal memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pemerintah pusat. Dalam perspektif keberlanjutan fiskal, kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri menjadi faktor penting karena mencerminkan kapasitas daerah dalam mempertahankan keseimbangan fiskal secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut terlihat pada Kabupaten Situbondo, di mana peningkatan PAD memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Ketika penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah,

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lainnya meningkat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat ketahanan fiskal daerah terhadap berbagai tekanan ekonomi maupun perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PAD merupakan faktor utama dalam meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah [18], [23]. Dengan demikian, penguatan basis PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Fiscal Sustainability

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki koefisien negatif sebesar -0,002 dengan tingkat signifikansi 0,224. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo selama periode penelitian. Secara konseptual, belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut umumnya tidak dapat dirasakan secara langsung pada periode yang sama ketika anggaran direalisasikan. Infrastruktur jalan, fasilitas publik, jaringan irigasi, maupun aset produktif lainnya membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak ekonomi yang mampu meningkatkan aktivitas usaha masyarakat dan memperluas basis penerimaan daerah.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa peningkatan Belanja Modal dalam penelitian ini belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan fiskal daerah. Selain faktor waktu, efektivitas Belanja Modal juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta tingkat pemanfaatan aset yang dibangun. Apabila investasi publik belum menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang optimal, maka kontribusinya terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi relatif terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian[23], [24], [32] yang menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap indikator fiskal dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pengaruh Belanja Modal terhadap Fiscal Sustainability lebih tepat dipahami sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya baru terlihat setelah aset yang dibangun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Sustainability*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo. Temuan ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -0,209 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, peningkatan Dana Perimbangan cenderung diikuti oleh penurunan tingkat keberlanjutan fiskal daerah. Secara ilmiah, hasil ini dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan fiskal (*fiscal dependency theory*) dan fenomena *flypaper effect*. Dana Perimbangan pada dasarnya dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Namun, ketika proporsi transfer pemerintah pusat menjadi terlalu dominan dalam struktur pendapatan daerah, pemerintah daerah berpotensi mengalami ketergantungan fiskal yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD secara optimal [14], [23].

Dalam konteks Kabupaten Situbondo, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan dominasi dana transfer dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Akibatnya, kapasitas fiskal daerah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat. Ketika keberlanjutan fiskal lebih banyak ditopang oleh sumber pendapatan eksternal daripada kemampuan ekonomi lokal, tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung melemah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa tingginya ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dapat menghambat upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dan pada akhirnya menurunkan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang [7], [8] . Oleh karena itu, meskipun Dana Perimbangan tetap diperlukan sebagai instrumen pemerataan fiskal, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap transfer tersebut melalui optimalisasi sumber-sumber PAD yang berkelanjutan.

Temuan Ilmiah Studi

Studi ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling menentukan *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. PAD terbukti menjadi

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

instrumen yang memperkuat keberlanjutan fiskal, sedangkan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan justru berpotensi melemahkannya. Di sisi lain, Belanja Modal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan karena manfaat ekonominya cenderung bersifat jangka panjang dan belum sepenuhnya terefleksi dalam periode pengamatan penelitian. Temuan tersebut memberikan bukti empiris bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya transfer yang diterima daerah, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun basis pendapatan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi strategi yang paling relevan untuk memperkuat *Fiscal Sustainability* Kabupaten Situbondo pada masa mendatang.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan *fiscal sustainability* Pemerintah Kabupaten Situbondo. PAD yang lebih tinggi mampu memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Sebaliknya, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap *fiscal sustainability*, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat dapat melemahkan kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Belanja Modal belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap *fiscal sustainability*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan program dan pemanfaatan aset yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Secara simultan, PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi *fiscal sustainability* Pemerintah Kabupaten Situbondo, sehingga ketiga variabel tersebut menjadi faktor penting dalam pengelolaan fiskal daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya mencakup Kabupaten Situbondo sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan data bulanan periode 2021–2025 sehingga belum menggambarkan kondisi keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Ketiga, pengukuran *fiscal sustainability* hanya diproksikan menggunakan rasio kemandirian fiskal sehingga belum mencerminkan seluruh dimensi keberlanjutan fiskal daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan perbaikan tata kelola penerimaan. Selain itu, efektivitas Belanja Modal perlu ditingkatkan melalui perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar mampu menghasilkan aset yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan, pemerintah daerah juga perlu mendorong kemandirian fiskal melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, optimalisasi aset daerah, dan penguatan investasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji *fiscal sustainability*, dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi daerah, efektivitas belanja operasional, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, tingkat investasi daerah, maupun indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan dengan keberlanjutan fiskal sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta menggunakan cakupan wilayah dan periode penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. K. K. Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 3, no. 1, pp. 141–162, 2025.

[2] A. Insani, S. Rahayu, and M. Erwati, "Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 1, pp. 109–125, 2023, doi: 10.31955/mea.v9i1.5377.

[3] I. N. Ardelia, H. K. Wulandari, Y. Ernitawati, and D. Dumadi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020," *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 60–80, 2022, doi: 10.29303/jaa.v7i1.165.

[4] S. Yuliawati, M. Zuliyana, and S. Rani, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA," *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, vol. 6, no. 1, pp. 13–29, 2024.

[5] K. Zakiah, "PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

TAHUN 2016-2020," *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*, vol. 7, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.22212/jbudget.v7i2.137.

[6] N. Zukhri, "Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 143–149, Jun. 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i2.213.

[7] Y. R. Mangopo, X. I. S. Landjang, K. H. P. Lambe, and A. Jaya, "Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura," *jesya*, vol. 8, no. 1, pp. 171–180, Jan. 2025, doi: 10.36778/jesya.v8i1.1887.

[8] Virginio Y. L Ndjurumbaha, Maria I. H.Tiwu, and Fransina W. Ballo, "Peran Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, vol. 2, no. 3, pp. 46–55, Jun. 2024, doi: 10.59024/jumek.v2i3.366.

[9] N. Maharani and R. Armaini, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022 Hak , kekuasaan , dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakat," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 21, no. 4, pp. 576–589, 2025.

[10] D. F. Sari, A. Wulandari, alean K. H. Suryana, N. A. T. Atmaja, and A. Sulistiyowati, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018-2022," *Ekobis:JurnalIlmuManajemendanAkuntansi*, vol. 13, no. 2, pp. 367–377, 2025.

[11] vidia utami Putri, buntoro heri Prasetya, and mutiara puspa Widyowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Pratama*, vol. 1, no. 3, pp. 2572–2580, 2024.

[12] D. V. Eryana, D. F. Istiqomah, O. Anandyta, and Z. R. Amalia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keungan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, vol. 3, no. 5, pp. 408–419, 2025.

[13] S. Kamilah and W. Ginting, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab Bandung Tahun 2017 -2024," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 21, no. 4, pp. 576–589, 2025, doi: 10.31851/jmwe.v21i4.15889.

[14] A. Anjani, E. J. Fithri, and S. Meilansari, "Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Anjani 1 , Eka Jumarni Fithri 2 , Selvita Meilansari 3 1," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 22, no. 4, pp. 792–806, 2026, doi: https://doi.org/10.31851/jmwe.v22i4.19866.

[15] K. Zakiah, "PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2016-2020," *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*, vol. 7, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.22212/jbudget.v7i2.137.

[16] Nadira Putri Riyanci, Felisha Rahma Antoni, Eva Hany Fanida, and Revienda Anita Fitrie, "Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 5, no. 6, pp. 1394–1403, May 2026, doi: 10.56799/jim.v5i6.17087.

[17] D. R. Agrawal, J. K. Brueckner, and M. Brülhart, "Fiscal Federalism in the Twenty-First Century," *Annu. Rev. Econom.*, vol. 16, no. 1, pp. 429–454, Aug. 2024, doi: 10.1146/annurev-economics-081623-020713.

[18] A. Afonso and J. C. Coelho, "Fiscal sustainability, fiscal reactions, pitfalls and determinants," *Appl. Econ.*, vol. 57, no. 26, pp. 3560–3571, Jun. 2025, doi: 10.1080/00036846.2024.2337808.

[19] OECD, "Fiscal federalism network," *https://www.oecd.org/en/topics/fiscal-federalism-network.html*, Jul. 01, 2024.

[20] IMF, "Fiscal Monitor : Putting a Lid on Public Debt," https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2024/10/23/fiscal-monitor-october-2024.

[21] W. Murtalingntyas, B. Wijayantini, A. Arif, H. A. Y. Abusaada, and T. Sobri, "Total Quality Management and Financial Performance: Strengthening Organizational Culture for Long-Term Business Sustainability," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, vol. 11, no. 1, pp. 179–189, Jun. 2025, doi: 10.32528/jmbi.v11i1.3237.

p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

[22] R. L. Ardhana, S. Suhendro, and S. Kuriniati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 3, pp. 4639–4647, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i3.9051.

[23] S. Ramadhani, N. Masnila, and Y. Dwitayanti, "Pengaruh Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 1650–1660, Nov. 2024, doi: 10.56799/ekoma.v4i1.5951.

[24] D. R. Rahmadhanty and A. Firmansyah, "Moderasi Kualitas Laporan Keuangan pada Kemandirian, Ketergantungan, Belanja Modal terhadap Kinerja Daerah," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, vol. 6, no. 2, pp. 327–343, Mar. 2025, doi: 10.35912/jakman.v6i2.3635.

[25] K. A. Febrian, M. A. Prayudi, and P. Y. P. Putra, "Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah: Literature Review," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, vol. 4, no. 2, pp. 177–187, Apr. 2026, doi: 10.69693/ijim.v4i2.470.

[26] B. Wijayantini, N. Mariana Mohd Din, M. Zulkifli Muhammad, A. Arif, and Hazeem Sidik. Mohamad, "Unveiling The Impact Of Political Connections On Cash Flow In Indonesian Firms," *International Journal of International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, vol. 7, no. 26, pp. 329–347, 2024, doi: 10.35631/IJEMP.726026.

[27] Naila Hanun Nazihah, Azkha Izatul Agista Putri, and Indra Devian Lumban Gaol, "Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Mengurangi Ketergantungan terhadap Transfer Pemerintah Pusat," *Jurnal Media Administrasi*, vol. 11, no. 1, pp. 32–41, Apr. 2026, doi: 10.56444/jma.v11i1.3666.

[28] B. E. Bunga, "ANALISIS PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PERILAKU FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI PULAU SUMATERA PERIODE 2014-2023 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 247–266, Apr. 2025, doi: 10.53515/lantabur.2025.6.2.247-266.

[29] A. Aryaputra, F. Pratiwi, and I. R. Aryasatya, "TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI WUJUD DESENTRALISI FISKAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN, EFEKTIF ATAU TIDAK?," *JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 7, no. 02, pp. 111–118, Sep. 2022, doi: 10.30996/jeb17.v7i02.7361.

[30] R. Bougie and U. Sekaran, *Research Methods for Business, with eBook Access Code: A Skill Building Approach*, 9th ed. john wiley & sons., 2025.

[31] Prof. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2nd ed. Bandung: ALFABETA, CV, 2020.

[32] M. N. F. Thoha and F. A. Novianti, "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022," *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 3, no. 3, pp. 254–263, Jul. 2024, doi: 10.70704/jpjmb.v3i3.295.